

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN POTENSI MARITIM TERHADAP PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT

Yogi Suwarno, MA., Ph.D

Dosen STIA LAN Jakarta

Bernadinus Yules Verne, A.MD., S.E.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Iwan Pribadi, S.Sos.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Abstract

Indonesia is geographically an island nation with two-thirds of the ocean area larger than the mainland. This can be seen with the coastline on almost every island in Indonesia ($\pm 81,000$ km) which makes Indonesia ranks second after Canada as the country that has the longest coastline in the world. This power is a great potential for advancing the Indonesian economy. The extent of the ocean compared to the total land area in the world reaches approximately 70 to 30, making it a challenge for countries in the world that have the interests of the sea to advance their maritime. As the development of the strategic environment, the role of the sea becomes significant and dominant in delivering the progress of a country.

Keywords: *Island States, Strategic Environment Development*

Abstrak

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara.

Kata kunci: Negara Kepulauan, Perkembangan Lingkungan Strategis

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara.

Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal itu berkontribusi pada angka kemiskinan yang masih tinggi. Sebagian diantaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir terkait yang tergolong kelompok paling miskin. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan memperburuk tingkat kesejahteraan dan kehidupan nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya, di samping mengurangi pendapatan nelayan, juga merugikan negara. Pencemaran laut dan kerusakan mangrove dan terumbu karang juga menambah masalah di sektor kelautan.

Selain masalah ekonomi dan lingkungan, masalah yang juga muncul di sektor maritim dan kelautan adalah masalah keamanan dan politik. Sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Perompakan di perairan Indonesia masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri maupun orang asing, baik yang ditujukan kepada kapal nelayan Indonesia, maupun kepada kapal asing.

Persoalan pulau-pulau terluar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah juga menimbulkan persoalan politik, antara lain tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya infrastruktur maritim dan kelautan menambah rumit persoalan.

KAJIAN LITERATUR

Pola Pembinaan Potensi Nasional menjadi kekuatan Hankamneg di bidang Maritim sebagai kekuatan Hankamneg di bidang Maritim yang melahirkan pemikiran, petunjuk, landasan, haluan, konsep strategik yang harus ditumbuh kembangkan oleh seluruh anak bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia di bidang maritim dapat dijadikan modal utama bangsa untuk tangkal berbagai permasalahan bangsa beserta tangkal berbagai permasalahan bangsa, beserta seluruh dampaknya. **Unclos (United Nations Convention on the Law of the Sea)**

Sasaran pembinaan potensi maritim adalah untuk pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut (dawilhanla) yaitu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan informasi dalam pemenuhan kebutuhan komponen cadangan dan pendukung bagi terlaksananya pertahanan dan keamanan wilayah laut. Pembinaan potensi maritim dalam fungsi yang lain adalah menjaga pada pangkalan laut yang berfungsi menjaga agar mata rantai pendistribusian kebutuhan tidak terputus, melihara sumber informasi/intelijen masyarakat.

Sistim Pertahanan Negara sesuai UU RI No 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) ” *sistim pertahanan negara adalah sistim yang bersifat alam semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan lainnya serta dipersiapkan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman*”.

Pemberdayaan wilayah dalam rangka pertahanan dan keamanan Nasional dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kekuatan penangkal awal dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang dapat menghambat pembangunan Nasional.. Di sisi lain penataan ruang diselenggarakan dengan tetap memperhatikan kondisi fisik wilayah NKRI yang rentan terhadap bencana, kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta kondisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi. Kesimpulannya bahwa pemberdayaan wilayah harus melihat kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kuat (Pasolong, 2012:175). Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian ini dalam

pengumpulan datanya menggunakan metode survei dengan teknik observasi, dokumentasi, kepustakaan dan angket yang disebarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Potensi Maritim Nasional adalah Pembinaan Potensi Nasional yang beraspek maritim yang memungkinkan untuk dikembangkan, dibina dan didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara bersama potensi lainnya dalam rangka pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Potensi Nasional adalah kemampuan nasional yang berada di ruang wilayah NKRI yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya yang memungkinkan untuk dikembangkan, dibina dan didayagunakan untuk kepentingan Hanneg. Potensi Nasional ini terdiri dari Potensi Ruang Kawasan, Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan, Potensi Sumber Daya Manusia, Potensi Sarana dan Prasarana, Potensi Nilai-nilai, Potensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Potensi Dana.

Termasuk adanya Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari banyaknya permasalahan yang kita hadapi di bidang pembinaan potensi maritim, maka diperlukan sinergi yang baik dari berbagai komponen bangsa yang terkait untuk dapat mengelola secara maksimal. Di sinilah peran pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) diperlukan dalam rangka mendukung program Pemerintah, khususnya program nawacita yang ketiga yaitu membangun negara dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa, termasuk di wilayah pesisir.

Pembinaan Potensi Maritim adalah upaya dan tindakan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut baik secara berdiri sendiri atau bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya dalam membantu Pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan laut yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. serta terwujudnya kemandirian TNI/TNI utamanya TNI-AL/Rakyat.

Postur strategi dan kondisi lingkungan merupakan acuan pelaksanaan Dawilhanla. Strategi Pembinaan Potensi Maritim membutuhkan aparat yang bukan hanya disiplin dan rajin, tetapi juga inovatif dan kreatif. Aparat Binpotmar yang profesional berarti aparat yang dapat laksanakan tugas secara efektif, efisien dan akuntabel. Penentuan kebijakan diharapkan dapat wadah kedinamisan tersebut, misalnya dengan dukungan utamanya anggaran yang lebih bersifat good oriented.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Soedarno, S.Sos. “*Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Hankamnas di bidang maritim & Permasalahannya* : Dharmala Jala Adhiguna, Kodikal, Januari 1994”.

Unclos (United Nations Convention on the Law of the Sea)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3).

Implementasi Kebijakan Pembinaan Potensi Maritim Terhadap Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, pasal 1 ayat (2).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34, tentang TNI, 2004. pasal 9 huruf (e).